



PERTUMBUHAN EKONOMI DAN POTRET KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2014-2018

Oleh

Santi Yunus

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Email: santishelo@yahoo.co.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan trend yang positif, pertumbuhan ekonomi periode 2014-2018 diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2014 sebesar 5,01 persen, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,07 persen. Sedangkan Tahun 2018 pertumbuhan nasional 5,17 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,30 persen. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tersebut maka diharapkan tingkat kemiskinan dapat menurun di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, namun pertumbuhan ekonomi dapat di nikmati oleh semua lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kurun waktu tahun 2015-2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah terus mengalami perlambatan namun masih lebih cepat tumbuh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar 5,17 persen. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan Tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi meningkat tidak dibarengi penurunan kemiskinan. Terjadinya Penurunan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018, Pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 sebesar 9,98 persen dengan persentase kemiskinan sebesar 14,09 persen. Dan Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,30 persen dengan persentase kemiskinan 13,69 persen. Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih tinggi dibandingkan kemiskinan nasional. Pengangguran yang tinggi dapat memicu kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi & Penagguran

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pembangunan ekonomi menjadi satu diantara jalan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika didukung oleh semua elemen dalam negara tersebut, dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama terlaksananya pembangunan ekonomi yang baik. Terjadinya perubahan struktur ekonomi dari angraris ke struktur ekonomi industri akan memberi keragaman kegiatan ekonomi.

Satu diantara upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketertinggalan ekonomi atau

keterbelakangan ekonomi di sebut dengan istilah efek menetes kebawah (*trickle down effect*). Namun kondisi yang terjadi justru *trickle up effect* atau efek muncrat ke atas. Efek pertumbuhan ekonomi yang membaik hanya dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi, sedangkan golongan pendapatan rendah tidak menikmati. Semestinya golongan yang terpinggirkan juga dapat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa keluar dari kemiskinan.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu diantara provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2018 diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi



nasional Tahun 2014 sebesar 5,01 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,07 persen. Pada Tahun 2018 pertumbuhan nasional 5,17 dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6,30 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap wilayah bahkan negara sedang berkembang adalah tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah masih tinggi, diatas persentase kemiskinan Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kajian terhadap dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018.

LANDASAN TEORI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu perubahan yang akan terjadi pada jangka panjang, dimana perubahan akan terjadi dengan kenaikan tabungan. Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses perubahan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang maka pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut, Boediono, 1992. Para tokoh ekonomi seperti Thomas Robert Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Trover Swan Trover Swan, dan Robert Solow, mengemukakan pendapatnya bahwa faktor produksi terdiri dari: jumlah penduduk/sumber daya manusia; jumlah stok barang modal; luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dipakai dalam produksi.

Memerlukan suatu inovasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Menurut Schumpeter bahwa inovator/wirausaha adalah pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal; pertumbuhan penduduk angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi menurut Scumpeter adalah masyarakat mengalami

peningkatan output, yang di akibatkan faktor produksi yang digunakan masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi. Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDRB. Badan Pusat Statistik 2019.

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

b. Kemiskinan

Berbagai definisi atau ukuran kemiskinan mengarah kepada dua perspektif yaitu “kemiskinan pendapatan” dan “kurangnya kebutuhan dasar kemiskinan”. Penghasilan kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi standar hidup tertentu sementara kurangnya kebutuhan dasar kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi beberapa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian seperti yang diidentifikasi oleh United Bangsa, Dana Anak-anak (*UNICEF*). Untuk studi ini kami menggunakan kemiskinan pendapatan sebagai akibat dari mudah dalam pengukuran dan memiliki ketersediaan standar pengukuran internasional seperti \$ 1 dan \$ 2 per hari.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling



banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran penduduk miskin

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Ukuran Kemiskinan **a. Head Count Index (HCI-P0)**, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) **b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan **c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)** menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. BPS 2019

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini hanya melakukan analisis yang hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan suatu data secara sistematis, sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif eksploratif memiliki tujuan menggambarkan keadaan suatu fenomena, penelitian ini bukan menguji hipotesis tertentu tetapi hanya memberikan gambaran riil suatu variable, gejala atau keadaan (Arikunto, 2006).

Lokasi penelitian di fokuskan pada Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu; Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo

Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kota Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

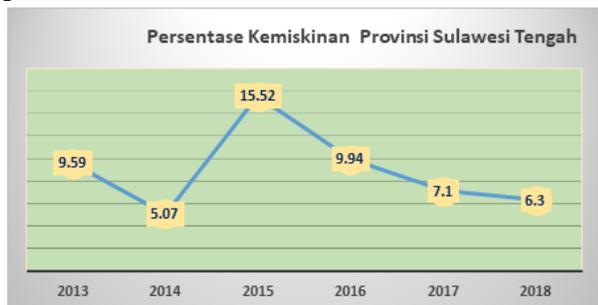
A. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran kegiatan perekonomian yang terjadi disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan mampu di nikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada daerah tersebut dan memberi manfaat bagi daerah belakangnya. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Demikian halnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pada grafik di bawah ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018. Grafik Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan trend berfluktuatif, Tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,59 persen mengalami penurunan di Tahun 2014, namun kembali meningkat di Tahun 2015 menjadi 15,52 persen. Kondisi Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah kembali menurun di Tahun 2016-2018 yaitu Tahun 2016 sebesar 9,98 persen dan Tahun 2017 sebesar 7,14 persen, mengalami penurunan hingga Tahun 2018 menjadi 6,30 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun di Tahun 2016-2018 karena penerimaan PDRB di beberapa kabupaten mengalami penurunan, diantaranya Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2014 penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi dari peraturan tersebut yaitu pelarangan ekspor bahan mineral mentah dan harus melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri melalui industri smelter. Terkait dengan aturan tersebut maka kabupaten yang berkegiatan pertambangan



tentunya terkena dampak, karena proses pemurnian nikel melalui smelter dibutuhkan proses untuk membuat nikel siap ekspor. Kondisi ini menjadi satu diantara penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Morowali Utara, namun demikian pemerintah terus berupaya untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS

B. Kondisi Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Cara perhitungan antara Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan disebut penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari komponen, yaitu garis kemiskinan non makanan (GKMN) dan garis kemiskinan makanan (GKM).

Berdasarkan BPS bahwa kondisi jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2009 – 2014 menunjukkan penurunan, namun periode 2015-2017 mengalami fluktuatif. Di Tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 489.840

jiwa atau 18,98 persen. Penurunan persentase kemiskinan terus menerus menurun hingga Tahun 2014, jumlah orang miskin turun menjadi 387.060 jiwa atau turun sebesar 13,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2015 persentase kemiskinan naik menjadi 14,07 persen, di Tahun 2016 meningkat menjadi 14,09 persen dan terus meningkat di Tahun 2017 menjadi 14,22 persen dan Tahun 2018 persentase kemiskinan turun menjadi 13,69 persen.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018

Tahun	Penduduk Miskin (jiwa)
2014	387,060
2015	421,630
2016	420,520
2017	420,520
2018	417.870

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka

Berdasarkan BPS jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 sebesar 420,210 jiwa atau 13,69 persen. Terjadi penurunan kemiskinan di bandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 417,870 jiwa atau 14,22 persen. Persentase kemiskinan Tahun 2013 – 2018 menunjukkan trend yang tidak stabil, khususnya pada Tahun 2014-2017 persentase kemiskinan mengalami peningkatan terus menerus, namun Tahun 2018 turun menjadi 13,69 persen

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018



Sumber: BPS



Berdasarkan kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan pada Tahun 2013 Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu Kabupaten Parimo sebanyak 75.50 ribu jiwa, Kabupaten Poso sebanyak 41.30 ribu jiwa dan Kabupaten Donggala sebanyak 49.60 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi jumlah penduduk miskin rendah yaitu 21.60 ribu jiwa dan 2.67 ribu jiwa.

Tahun 2013 - 2017 jumlah penduduk miskin terus bertambah di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 75.50 ribu jiwa meningkat menjadi 82.61 ribu jiwa di Tahun 2015, selanjutnya Tahun 2017 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 82.88 ribu jiwa. Namun Kabupaten Morowali jumlah penduduk miskin terus berkurang sejak Tahun 2013-2017. Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 35.40 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin terus menurun sampai Tahun 2017 menjadi 16.99 ribu jiwa.

Tabel 2. Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 (Ribu Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Banggai Kepulauan	29.40	28.24	18.57	18.72	18.56
Banggai	33.80	32.45	34.74	33.97	33.50
Morowali	35.40	34.04	17.79	17.36	16.99
Poso	41.30	39.65	42.64	42.23	41,88
Donggala	49.60	47.56	54.17	55.69	54,44
Tolitoli	30.70	29.46	30.70	30.68	30,64
Buol	21.60	20.82	24.31	25.27	25,76
Parigi Moutong	75.50	74.96	82.61	82.38	82,88
Tojo Una-una	29.70	27.73	27.62	27.62	27,30
Sigi	27.60	26.49	29.14	29.55	29,55
Banggai Laut	-	-	12.33	11.59	11,63
Morowali Utara	-	-	19.81	19.22	19,25
Kota Palu	25.90	25.66	27.19	26.24	25,49
Sulawesi Tengah	400.40	387.06	421.63	420.52	417,87

Sumber : BPS Sulteng Tahun 2018

Selama Periode 2013-2017, jumlah penduduk miskin meningkat pada lima kabupaten yakni Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, dan Sigi

Sumber: Materi Kinerja Ekonomi Dan Fiskal Di Provinsi Sulteng

Persentase penurunan penduduk miskin di Sulawesi Tengah ditunjukkan Tabel 3. Tercatat sembilan kabupaten dengan persentase kemiskinan terus menurun dari Tahun 2015-2017, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali. Kabupaten Poso, Kabupaten Toliloli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten banggai

Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)		
	2015	2016	2017
Banggai Kepulauan	16,08	16,18	15,92
Banggai	9,84	9,47	9,20
Morowali	15,80	15,13	14,55
Poso	18,16	17,71	17,16
Donggala	18,11	18,59	18,17
Tolitoli	13,64	13,47	13,30
Buol	16,36	16,68	16,65
Parigi Moutong	18,05	17,80	17,55
Tojo Una-una	18,79	18,56	18,15
Sigi	12,75	12,76	12,66
Banggai Laut	17,68	16,60	16,17
Morowali Utara	16,91	16,07	15,73
Kota Palu	7,42	7,06	6,74

Sumber: BPS

C. Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengurangi persentase kemiskinan dengan mengupayakan berbagai macam program, namun persentase kemiskinan juga masih tetap tinggi. Program yang telah direncanakan ada pada level nasional dan daerah. Persentase kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2018 sebesar 13,69 persen, masih lebih tinggi dari kemiskinan nasional sebesar 9,82 persen. Dari 34 Provinsi se Indonesia Sulawesi Tengah berada pada peringkat ke sembilan memiliki persentase kemiskinan tertinggi.

Tahun 2018, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali. Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu persentase kemiskinannya di wilayah tersebut terus menurun. Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Donggala, dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,27 persen dan



18,03 persen. Sedangkan Kota Palu dan Kabupaten Banggai dengan persentase kemiskinan sangat rendah, yaitu 9,12 persen dan 6,58 persen. Penduduk miskin Sulawesi Tengah sebahagian besar berorientasi pada daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Tahun 2018 sebesar 9,50 persen kemiskinan berada di perkotaan, sedangkan 15,40 persen berada di pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berorientasi di pedesaan, keadaan ini juga terjadi pada provinsi lainnya di Indonesia.

Tabel 4. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 (%)

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)
Banggai Kepulauan	15,65
Banggai	9,12
Morowali	14,34
Poso	16,71
Donggala	18,03
Tolitoli	13,66
Buol	16,08
Parigi Moutong	17,41
Tojo Una-una	18,27
Sigi	12,60
Banggai Laut	16,32
Morowali Utara	15,53
Kota Palu	6,58

Sumber: BPS

D. Tingkat Pengguran Provisni Sulawesi Tengah

Kemiskinan yang tinggi karena adanya pengangguran yang tinggi, ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal karena tidak memiliki pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan. Tarigan, 2021 berpendapat, pengagguran mampu memengaruhi tingkat kemiskinan dengan cara, misalnya: 1) jika rumah tangga memiliki

likuiditas yang terbatas dimana konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, pengannnguran yang terjadi dapat mempengaruhi *income proverty rate* dengan *consumption poverty rate*. 2). Jika rumah tangga memiliki likuiditas yang baik, artinya konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Maka tingginya angka pengangguran akan memicu bertambahnya tingkat kemiskinan. Pengangguran akan mengurangi permintaan dan kemampuan membeli barang/jasa. Makin meningkat pengangguran maka meningkat pula angka kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini harus benar-benar diserap dalam kegiatan ekonomi dengan baik agar mendorong perekonomian di Sulawesi Tengah. Lapangan pekerjaan yang terbatas dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah akan menjadi persoalan negatif dalam perekonomian. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus didukung tersedianya lapangan kerja yang memadai. Besarnya angkatan kerja justru akan menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi pembangunan. Beban demografi yang tinggi dan angka pengangguran justru akan berdampak buruk bukan hanya perekonomian, namun sosial, dan politik pun juga terdampak.

Tabel 4. Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Periode Februari 2015 – 2021 (Ribuan)

Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja (Bekerja + Pengangguran)	1342.61	1384.23	1557.1	1570.38
Bekerja	1293.22	1327.41	1510.78	1520.3
Pengangguran	49.39	56.82	46.32	50.08

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah.



Jumlah pengangguran di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, Tahun 2015 jumlah pengangguran sebanyak 49.39 ribu meningkat menjadi 56.82 ribu Tahun 2016 atau meningkat 15,04 persen. Pada Tahun 2017 pengangguran turun menjadi -18.48 persen. Namun kembali meningkat di Tahun 2018 yaitu 8,12 persen.

Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Periode Februari 2015 – 2018

Kegiatan Utama	2016	2017	2018
Angkatan Kerja (Bekerja + Pengangguran) (%)	3,10	12,49	0,85
Bekerja (%)	2,64	13,81	0,63
Pengangguran (%)	15,04	-18,48	8,12

Sumber: BPS

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018 menunjukkan trend yang positif, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi terus menerus. Pertumbuhan ekonomi yang menurun di Tahun 2016-2017 diikuti persentase kemiskinan mengalami peningkatan di Provinsi Sulawesi Tengah, demikian halnya yang terjadi di Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi menurun diikuti dengan penurunan persentase kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu peningkatan kemiskinan. Tercatat sembilan kabupaten dengan persentase kemiskinan terus menurun dari Tahun 2015-2017, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali. Kabupaten Poso, Kabupaten Toliloli, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- [2] Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- [3] Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta, BPFE UGM.
- [4] Madjid, U., & Saputra, R. (2017). *Effectiveness Of The Program Of Empowerment Problems With Social Welfare Problems In Poverty Management* (Study In In *The International Journal Of Eprints.Ipdn.Ac.Id*. [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/2455/1/Effectiveness Of The Program Of Empowerment Problems With Social Welfare Problems.Pdf](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/2455/1/Effectiveness%20Of%20The%20Program%20Of%20Empowerment%20Problems%20With%20Social%20Welfare%20Problems.Pdf)
- [5] Nasution, Z. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*. [Https://Doi.Org/10.36987/ECobi.V1i2.20](https://doi.org/10.36987/ECobi.V1i2.20)
- [6] Sadono Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Kedu). Prenada Media Group.
- [7] Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, vol 4, No. 2, Desember 2007.
- [8] Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*.
- [9] Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional*. In *Ekonomi Regional*.
- [10] Todaro P, M . 2000 *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Erlangga Jakarta
- [11] Yulianto Kadji. (2004). *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Oleh: Yulianto*



Kadji. *Metallurgical And Materials Transactions A*.

- [12] Badan Pusat Statistik, 2019. Sulawesi Tengah Dalam Angka 2019
- [13] Badan Pusat Statistik, 2019. Sulawesi Tengah Dalam Angka 2017
- [14] BPS: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah